



E-SUKMA

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat melalui E-SUKMA Provinsi Jawa Timur Periode Januari-Juni 2024

RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

DAFTAR ISI

DAFTAF	R ISI	i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan	
	Masyarakat	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	2
BAB II	PENGUMPULAN DATA SKM	
	2.1. Pelaksanaan SKM	3
	2.2. Metode Pengumpulan Data	3
	2.3. Lokasi Pengumpulan Data	4
	2.4. Waktu Pelaksanaan SKM	4
	2.5. Penentuan Jumlah Responden	4
BAB III	HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
	3.1 Jumlah Responden SKM	5
	3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	6
BAB IV	ANALISIS HASIL SKM	
	4.1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan	
	Unsur Layanan	7
	4.2. Rencana Tindak Lanjut	7
	4.3. Tren Nilai SKM	8
BAB V	KESIMPULAN	9
LAMPIR	AN	10
1.	Kuisioner	11
2.	Hasil Pengolahan Data	14
3.	Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	21
4.	Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada	
	Periode Sebelumnya	22

BABI

PENDAHULUUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Rsud Prof dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Timur, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Rsud Prof dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- 1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri di Rsud Prof.dr Soekandar Kabupaten Mojokerto dengan menyediakan Stiker barcode SuKMa-e Jatim pada Rsud Prof. dr Soekandar Kabupaten Mojokerto.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Scan Barcode SuKMa-e Jatim yang sudah disediakan di Rsud Prof dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto yang bisa langsung di scan pada ponsel pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Rsud Prof. dr Soekandar Kabupaten Mojokerto yaitu:

a. Persyaratan

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

b. Sistem, mekanisme dan prosedur

Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

c. Waktu penyelesaian

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/tarif

Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi pelaksana

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

g. Perilaku Pelaksana

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

h. Penangan pengaduan, saran dan masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan prasarana

Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Rsud Prof dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto pada waktu jam pelayanan. Untuk pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian mandiri dengan didampingi pelaksana di Rsud Prof dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari	5
2.	Pengumpulan Data	Januari - Juni	94
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli - Agustus	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Agustus	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

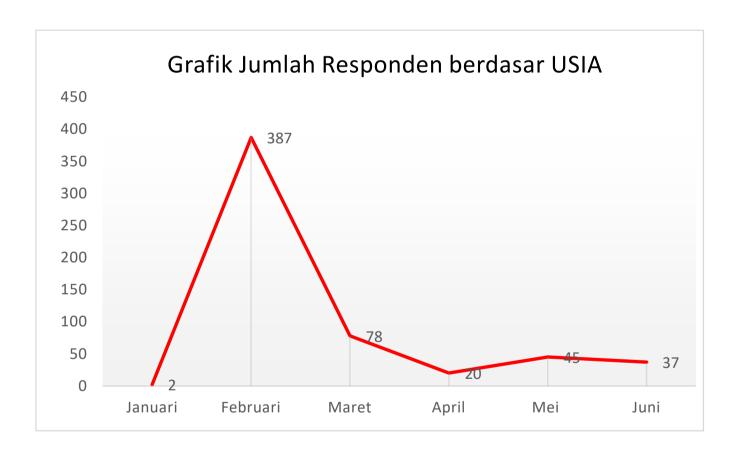
Dalam penentuan responden, merupakan jumlah total dari pengunjung yang mengisi link pada aplikasi e-Sukma. Jumlah responden mulai 1 Januari s/d 30 Juni 2024 adalah 569 responden.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 98 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	199	34,97 %
		PEREMPUAN	370	65,03 %
	Jumlah Respon	569	100 %	



Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

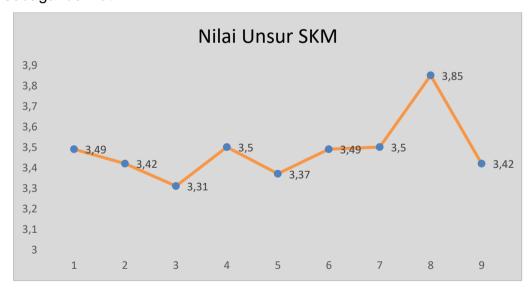
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

		Nilai Unsur Pelayanan							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,49	3,42	3,31	3,5	3,37	3,49	3,5	3,85	3,42
Kategori	A	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
IKM Unit Layanan			86,1	19 (A ata	u Sang	at Baik)		

Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut:



- 1. Persyaratan
- 2. Prosedur
- 3. Waktu Pelayanan
- 4. Biaya / Tarif
- 5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan
- 9. Sarana dan Prasarana

BAB IV ANALISI HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- 1. Tiga unsur yang mendapat nilai terendah yaitu:
 - a. Waktu Pelayanan dengan nilai 3,31
 - b. Produk spesifikasi jenis pelayanan dengan nilai 3,37
 - c. Sarana dan Prasarana dengan nilai 3,42
- 2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu:
 - a. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dengan nilai 3,85
 - b. Persyaratan dengan nilai 3,49
 - c. Kompetensi pelaksana dengan nilai 3,49

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Semoga antrian di loket pendaftaran dapat di tangani dengan baik supaya tidak membludak dan sangat lama saat pendaftaran
- Untuk tempat tunggu bisa diperbanyak
- Harap ada penambahan lahan parkir khususnya mobil.. terima kasih
- Untuk pegawai sebagai pelayan publik harus ramah dan sopan, terkhusus bu sri wahyuni
 Jika dianalisa dari pengaduan tersebut, maka unsur yang perlu diperbaiki yaitu :
- 1. Waktu Pelayanan
- 2. Sarana dan Prasarana

4.2 Rencana Tindak Lanjut

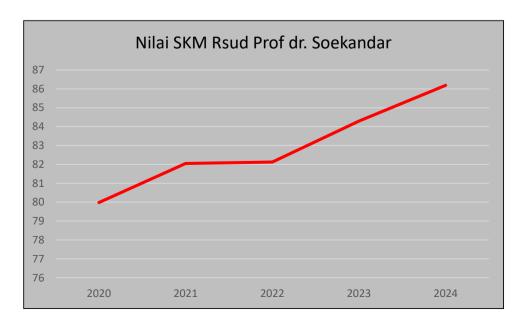
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 1 bulan), jangka menengah (lebih dari 2 bulan, kurang dari 6 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 6 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

	Pr	ioritas	Waktu				Penanggung
No	Unsur	Program/Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Jawab
1	Prosedur, Waktu Pelayanan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP pelayanan. Khususnya tentang alur pelayanan terkait pendaftaran pasien yang datang on site, maupun melalui online (wa, jkn mobile)			>	>	Bidang Pelayanan Medis
		Memeriksa kondisi ruang tunggu, untuk penempatan kursi tunggu.			>	٧	Bagian Umum
2	Sarana dan prasarana	Memeriksa kondisi lahan parkir, jika lokasi tidak mencukupi, perlu dipertimbangkan pembuatan lahan parkir bertingkat. Jika tidak ada, mencari lokasi lain untuk lahan parkir			٧	٧	Bagian Umum

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rsud Prof dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:



BAB V KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode mulai Januari sampai dengan Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik periode Januari sampai dengan Juni di Rsud Prof. dr Soekandar Kabupaten Mojokerto, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 86,19
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi jenis pelayanan dan Sarana & Prasarana
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan saran & masukan, Pesryaratan dan Kompetensi Pelaksana.

RUMAH SAKIT UMUM DAE PROF. DR. SOEKANI

Direktur UOBK RSUD Prof. Dr. Soekandar

KAH KARDOO aten Mojokerto

r อนาคนาน ASKUTUB, M.M.R อีกเอเกล Utama Muda

NIP.19660722 200112 1 001

LAMPIRAN

1. Kuisioner

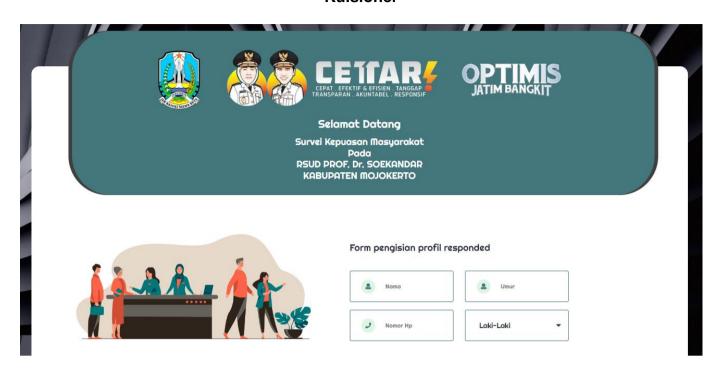
SCAN QRCODE UNTUK MEMULAI SURVEI RSUD PROF. Dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO



https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1350

Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

Kuisioner







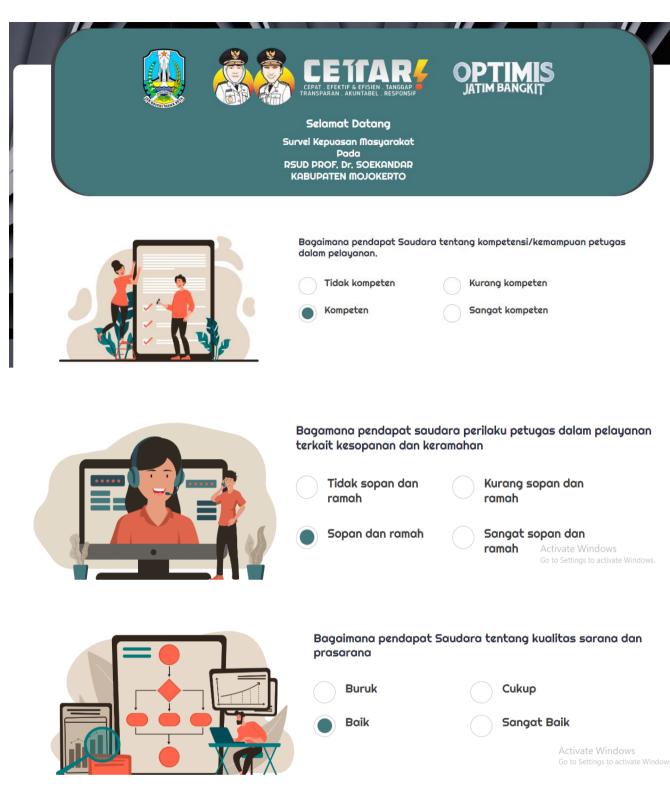
Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

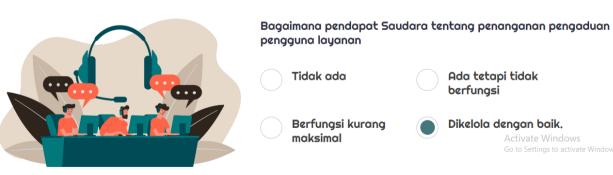






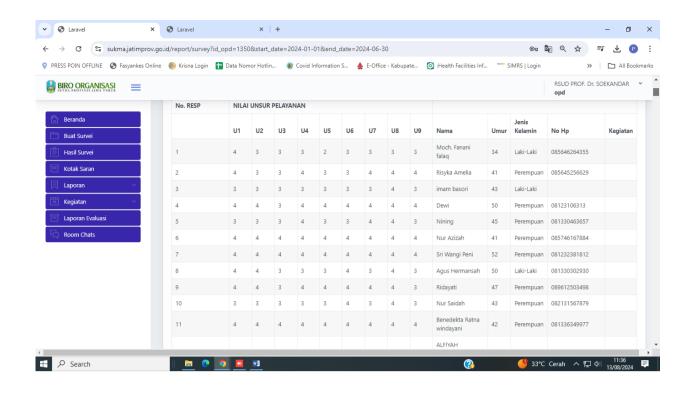
Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

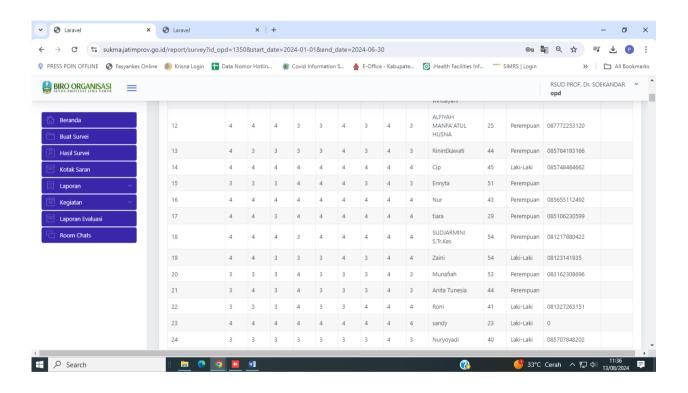


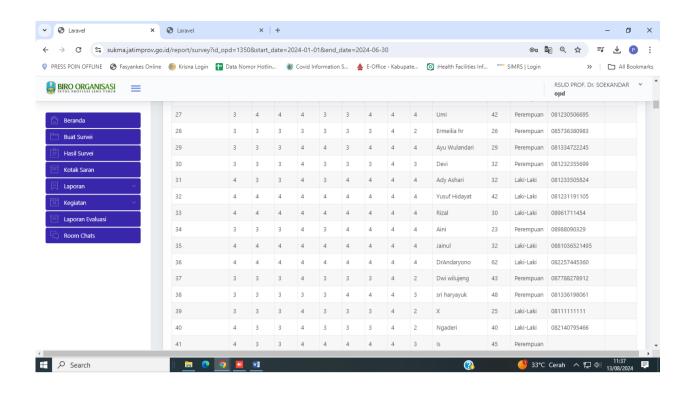


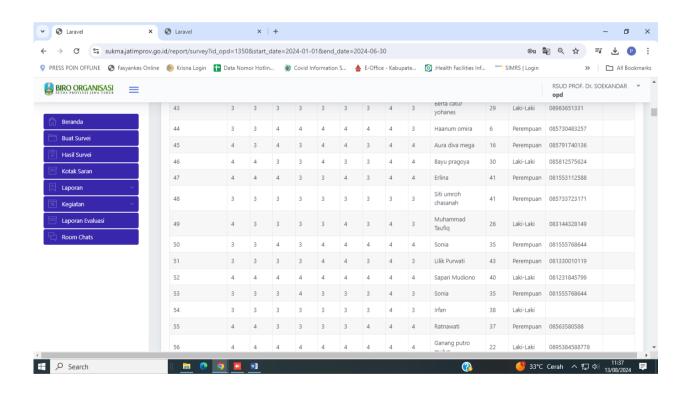
Sumber data: https://sukma.jatimprov.go.id/login

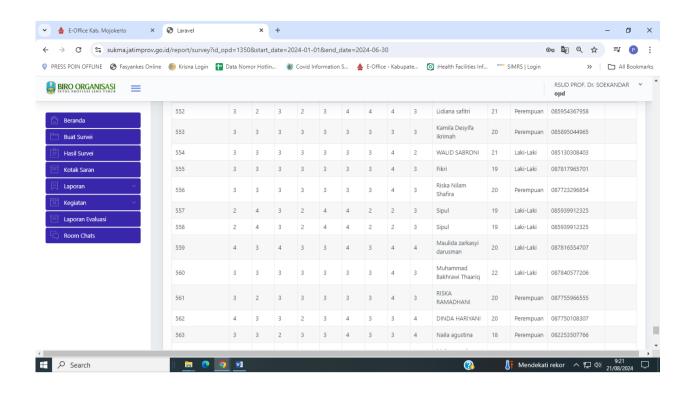
Activate Windows

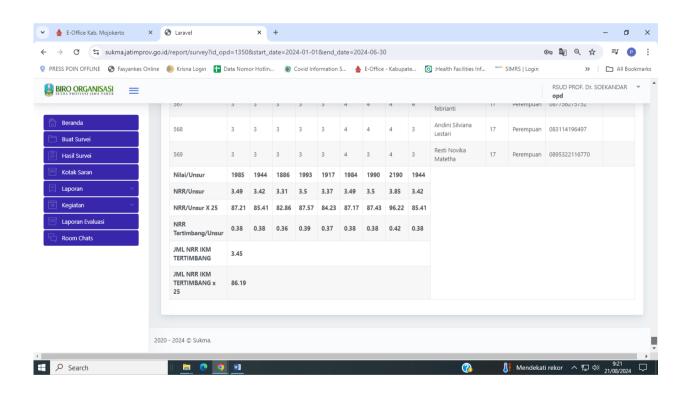


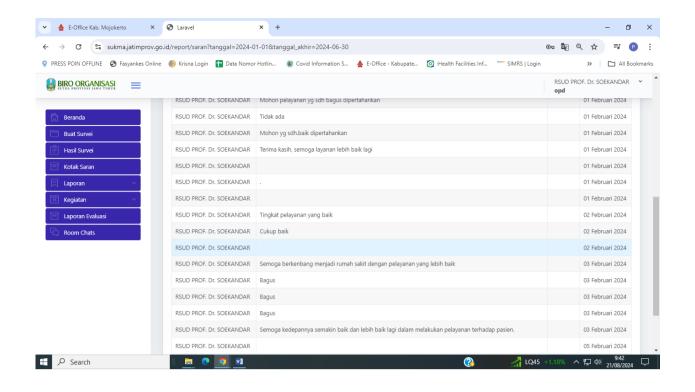


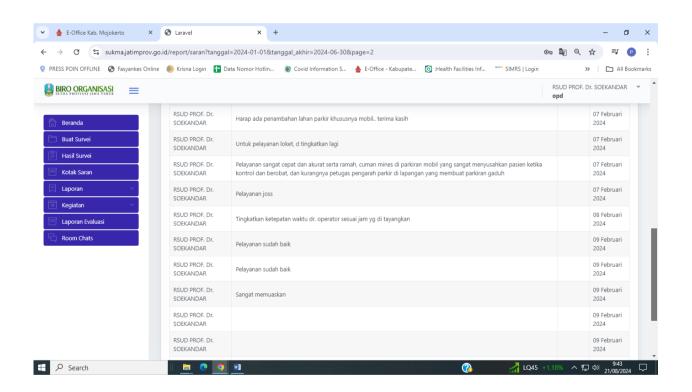


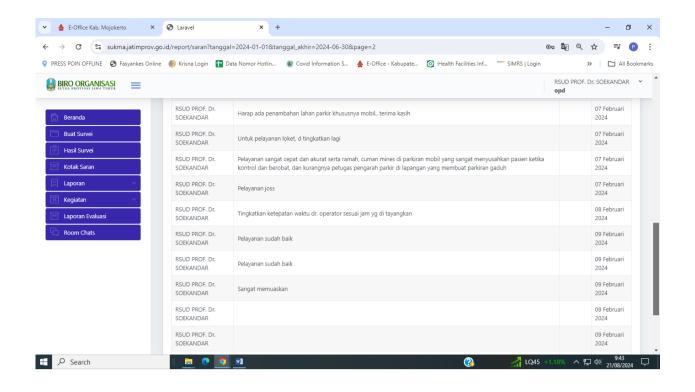


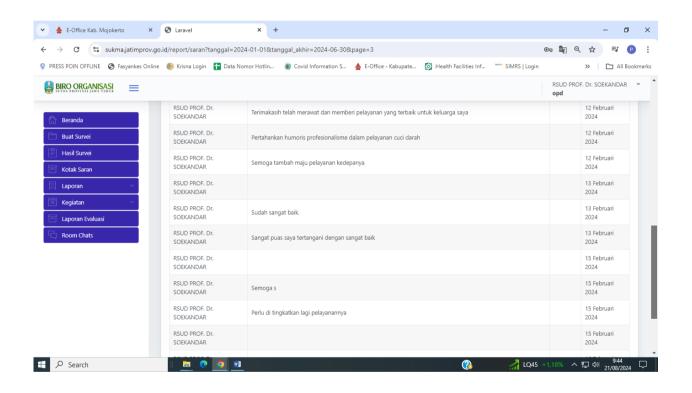


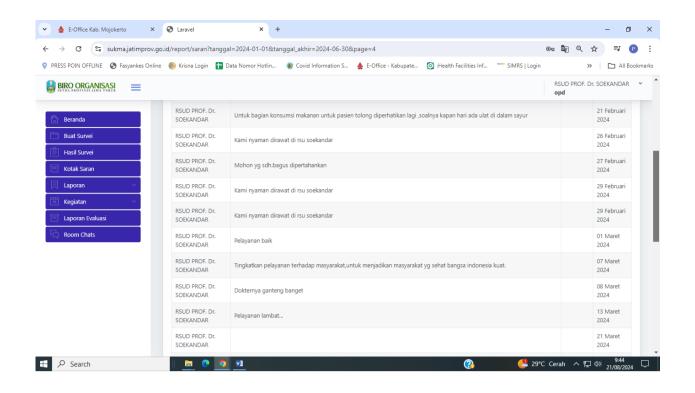


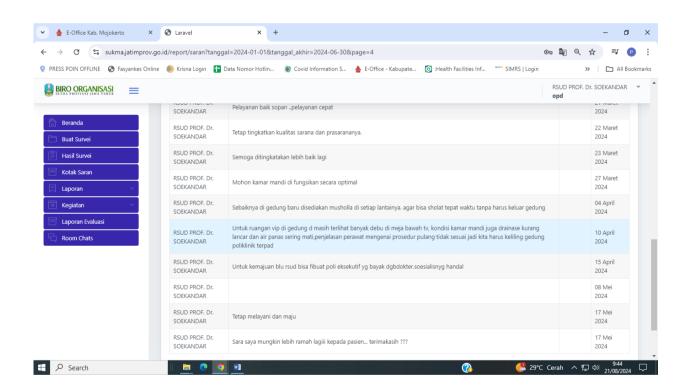


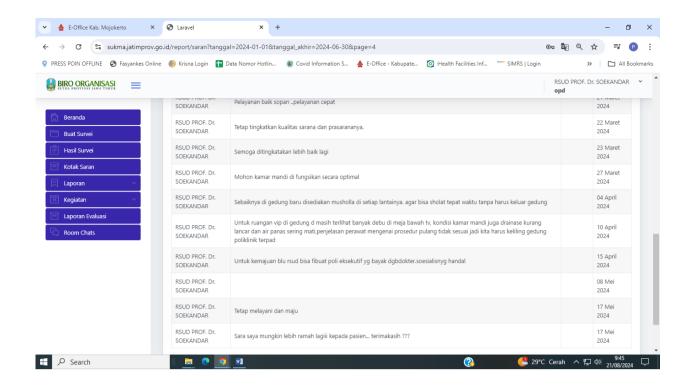


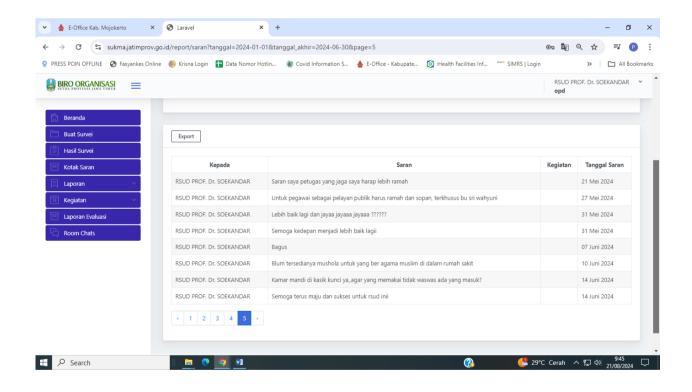












2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-foto Pelaksanaan SKM)





3. Laporan Hasil Tindak Lanjut

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Periode 2023



RSUD Prof dr. Soekandar KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Bagian Organisasi perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan public secara terus menerus.

.

BAB II DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat di Rsud Prof. Soekandar Kabupaten Mojokerto periode 2023 yaitu 84.49 . Pada unsur menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai pelayanan seperti dapat terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No	Unsur	Nilai Unsur	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,3	А
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,22	В
3	Waktu Penyelesaian	3,14	В
4	Biaya/Tarif	3,53	А
5	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3,22	В
6	Kompetensi Pelaksana	3,31	А
7	Perilaku Pelaksana	3,27	В
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,85	А
9	Saranan dan Prasarana	3,27	А

Berdasar pada data diatas, terdapat beberapa unsur yang menjadi perhatian lanjutan karena rendahnya nilai pada unsur tersebut. Maka dari itu perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsure yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Periode 2023

	Prio		Wa	ktu		Penanggung	
N o	Unsur	Program/Kegiatan	TWI TW TW TW		Jawab		
1	Sarana dan Prasarana	Monitoring dan Evaluasi terhadap lingkungan sekitar yang dekat dengan bangunan.			٧	v	Rsud Prof dr Soekandar
2	Prosedur waktu dan Pelayanan	Monitoring dan Evaluasi tentang SOP Pelayanan			V	V	Rsud Prof dr Soekandar

BAB III REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Tantangan/Hambatan
1	Monitoring dan Evaluasi terhadap lingkungan sekitar yang dekat dengan bangunan.	Sudah	Telah dilakukan penutupan dengan terpal.	Belum bisa maksimal karena ada angin
2	Monitoring dan Evaluasi tentang SOP Pelayanan	Sudah	Melakukan evaluasi terkait alur pelayanan.	Belum bisa maksimal karena kondisi keadaan berbeda – berbeda.

Direktur LIOBK RSUD Prof. Dr. Soekandar

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

V & NASKUTUB, M.M.R Pembina Utama Muda

NIP.19660722 200112 1 001